



**STRATEGI PEMERINTAH DALAM PERTUMBUHAN DAN  
KEBERLANJUTAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)  
INDUSTRI KERAJINAN MARMER DI ERA DIGITALISASI**  
(Studi Kasus di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar

Sarjana Administrasi Publik

Oleh :

**DEWI PUSPITASARI**

**NPM. 22001091095**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**MALANG**

**2024**

## RINGKASAN

Dewi Puspitasari, 2024, NPM 22001091095 Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Strategi Pemerintah dalam Pertumbuhan dan Keberlanjutan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Industri Kerajinan Marmer di Era Digitalisasi Studi Kasus di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, Dosen Pembimbing : (1) Dr. Afiffudin, S.Ag., M.Si (2) Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP

---

Kebijakan UMKM diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 yang berfokus pada pemberdayaan yang lebih terintegrasi antar usaha mikro kecil dan menengah sehingga mampu berkembang secara mandiri dan optimal. UMKM saat ini telah menjadi salah satu tulang punggung ekonomi negara. UMKM memiliki kapasitas untuk menciptakan produk atau layanan yang lebih terjangkau bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Banyak kesulitan yang dialami oleh pelaku usaha UMKM industri kerajinan marmer terkait sumber daya manusia nya seperti pengrajin kurang terampil dalam teknologi, penggunaan mesin tradisional dalam pembuatannya, pengadaan permodalan, perluasan jaringan pemasaran, serta konsumen dominan menyukai produk populer saja.

Dalam penelitian ini menggunakan teori pengembangan UMKM Menurut Anggraeni (2013) yaitu terletak pada dua pihak dimana keduanya saling bersinergi. Pihak internal yaitu dari pelaku usaha meliputi: (1) pengadaan permodalan; (2) inovasi hasil produksi; (3) (perluasan jaringan pemasaran (4) legalitas usaha dan dari pihak eksternal (peran pemerintah) meliputi: (1) pemberian akses UMKM terhadap Sumber Permodalan; (2) pengadaan pembinaan dan pelatihan; (3) peningkatan promosi produk; (4) perluasan pemasaran produk; (5) serta sarana dan prasarana. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif pendekatan deskriptif menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Miles, Huberman & Saldana (1984) dalam Sugiyono (2022:322) yang meliputi 4 tahap yaitu pengumpulan data, Kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan. Fokus dari penelitian strategi pemerintah dan dampak digitalisasi dalam pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM industri kerajinan marmer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam pertumbuhan UMKM industri kerajinan marmer di era digitalisasi sudah berjalan cukup baik namun masih terdapat beberapa kendala dilihat dari indikator yang dikemukakan oleh Anggraeni (2013). Hal ini dapat dilihat dari kedua belah pihak yaitu antara pelaku usaha meliputi pengadaan permodalan, inovasi hasil produksi, perluasan jaringan pemasaran, legalitas usaha Pemerintah meliputi pemberian akses permodalan bentuk kredit usaha, pengadaan pembinaan dan pelatihan, peningkatan promosi produksi melalui pameran atau bazar, perluasan pemasaran serta bantuan sarana dan prasarana.

Untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di sektor kerajinan marmer dalam era digitalisasi, pemerintah sebaiknya fokus pada penyediaan pelatihan digital berupa sosialisasi. Selain itu, mempermudah perizinan, mendorong kemitraan strategis, dan memberikan bantuan dalam pemasaran digital akan memperkuat daya saing UMKM. Perencanaan mengenai permodalan, inovasi produksi, pendistribusian dan sarana prasarana dengan baik juga penting untuk memastikan kualitas dan inovasi produk. Langkah-langkah ini akan membantu UMKM beradaptasi dengan perubahan digital dan meraih kesuksesan jangka panjang.

**Kata Kunci : Strategi, UMKM, Tulungagung**



## SUMMARY

Dewi Puspitasari, 2024, NPM 22001091095 Public Administration Study Program, Administrative Sciences, Islamic University of Islam Malang, Government Strategy for the Growth and Sustainability of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the Marble Crafts Industry in the Era of Digitalization Case Study in Gamping Village, Campurdarat District, Tulungagung Regency, Supervisor : (1) Dr. Afiffudin, S.Ag., M.Si (2) Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP

---

The policy for SMEs is regulated by Law No. 20 of 2008 of the Republic of Indonesia, which focuses on more integrated empowerment among micro, small, and medium enterprises so that they can develop independently and optimally. SMEs have now become one of the backbones of the national economy. SMEs have the capacity to create products or services that are more affordable for low-income communities. Many challenges are faced by SMEs in the marble craft industry related to human resources, such as craftsmen being less skilled in technology, the use of traditional machines in production, access to capital, market network expansion, and consumers predominantly favoring only popular products.

This research uses the SME development theory according to Anggraeni (2013), which is based on two parties working synergistically. The internal party, which includes the business actors, covers: (1) capital acquisition; (2) production innovation; (3) market network expansion; (4) business legality. The external party (government role) includes: (1) providing SMEs access to capital sources; (2) providing coaching and training; (3) increasing product promotion; (4) expanding product marketing; (5) and infrastructure and facilities. The type of research used is qualitative with a descriptive approach using primary and secondary data sources. The data analysis technique used in this research is Miles, Huberman & Saldana (1984) in Sugiyono (2022:322), which includes 4 stages: data collection, data condensation, data presentation, and conclusion. The focus of the research is on government strategies and the impact of digitization on the growth and sustainability of SMEs in the marble craft industry.

The research results show that the Tulungagung Regency Government's strategy for the growth of SMEs in the marble craft industry in the era of digitization has been fairly effective but still faces some challenges as seen from the indicators presented by Anggraeni (2013). This can be seen from both parties: business actors, including capital acquisition, production innovation, market network expansion, and business legality; and the government, including providing access to capital in the form of business credit, coaching and training, increasing product promotion through exhibitions or bazaars, market expansion, and providing infrastructure and facilities.

To support the growth and sustainability of SMEs in the marble craft sector in the digital era, the government should focus on providing digital training in the form of socialization. Additionally, simplifying licensing, encouraging strategic partnerships, and providing assistance in digital marketing will strengthen the competitiveness of SMEs. Proper planning regarding capital, production innovation, distribution, and infrastructure is also important to ensure product quality and innovation. These steps will help SMEs adapt to digital changes and achieve long-term success.

**Keywords : Strategy, MSMEs, Tulungagung**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Digitalisasi adalah proses membuat atau mengacu pada penggunaan teknologi dan data digital untuk meningkatkan bisnis, pendapatan, dan menciptakan budaya digital ( Crawford et al, 2020; Johannesen & Olsen, 2010 ). Digitalisasi merupakan proses konversi dari analog ke digital dengan menggunakan teknologi dan data digital dengan sistem pengoprasian otomatis dan sistem terkomputerisasi. Digitalisasi sendiri dilakukan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja setiap bagian dari industri, sehingga waktu dan seluruh sumber daya yang dimiliki dapat diolah seoptimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. (Dirgantara & Suryadarma, 2014)

Pelaku bisnis mulai menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk menjalankan maupun menunjang kegiatan bisnis mereka. Pergerakan dan perubahan cara berbisnis yang semakin cepat ke arah digitalisasi ini memaksa pelaku bisnis untuk beradaptasi mengikuti perubahan tersebut. Bagi perusahaan besar, perubahan pola bisnis yang mengarah pada proses digitalisasi tidak terlalu mengalami kendala dikarenakan dengan karakteristik perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang cukup baik. Namun, bagi UMKM proses digitalisasi ini akan membutuhkan banyak persiapan untuk mendorong digitalisasi dan mempermudah UMKM dalam menghadapi perubahan yang terjadi,

pemerintah kini mulai meningkatkan kemudahan akses dan melakukan transfer teknologi kepada pelaku UMKM agar mampu bertahan dalam persaingan bisnis. (Pubiyanti et al., 2021)

Kemampuan penguasaan perangkat digital dan internet merupakan hal mutlak yang harus dikuasai oleh UMKM jika ingin bertahan dalam persaingan (Purwana et al., 2017). Keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mencerminkan wujud nyata kehidupan sosial dan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia. UMKM di Indonesia memberikan peran penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha, mendukung pendapatan rumah tangga dan merupakan tulang punggung perekonomian bangsa Indonesia, sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi. (Al Farisi et al., 2022)

Kebijakan UMKM diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 yang berfokus pada pemberdayaan yang lebih terintegrasi antar usaha mikro kecil dan menengah sehingga mampu berkembang secara mandiri dan optimal. (Kadeni, 2020)

Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah memainkan peran yang sangat penting dalam kemajuan ekonomi di Indonesia. UMKM saat ini telah menjadi salah satu tulang punggung ekonomi negara. UMKM memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan pasar yang dapat membuat bisnis bertahan dalam situasi yang sulit. UMKM memiliki kapasitas untuk menciptakan produk atau layanan yang lebih terjangkau bagi masyarakat yang

berpenghasilan rendah. Selain itu, UMKM juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah. (smesta.kemenkopukm.go.id, 2023)

Industri sendiri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang-barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangunan dan perekayasaan industri. (Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian)

Definisi industri menurut Ali (2011) adalah suatu lokasi/tempat dimana aktivitas produksi akan diselenggarakan. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Pasal 1 tentang Perindustrian disebutkan bahwa:

“ Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, dan/atau barang setengah jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.”

Masalah yang dihadapi pada sektor UMKM saat ini yaitu akses terbatas terhadap modal, pendanaan, dan teknologi, kurangnya kemampuan manajerial, dan kesulitan dalam memasuki pasar yang lebih luas. Selain itu, percepatan transformasi digital juga menjadi kunci bagi perkembangan UMKM di era yang semakin digital ini. Strategi pemerintah dalam rangka mencapai potensi penuh sektor UMKM, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi sangat penting. Pemerintah melibatkan UMKM dalam proses pengambilan keputusan, mendengarkan

kebutuhan mereka, dan menyediakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM. Sementara itu, sektor swasta dapat berperan sebagai mentor, investor, atau mitra strategis bagi UMKM. (smesta.kemenkopukm.go.id, 2023)

Menurut (Firmansyah, 2014) strategi pemerintah dalam pemberdayaan UMKM meliputi Strategi peningkatan kemampuan finansial, pengembangan pemasaran (meningkatkan akses usaha kecil kepada pasar dan proteksi pasar), pengembangan sumberdaya alam manusia, dan strategi pengaturan pengendalian ( pengaturan perijinan dan fungsi kelembagaan). Dengan strategi yang digunakan dapat mengubah keadaan UMKM yang lebih baik.

Pengembangan UMKM (Anggraeni, 2013) bukan merupakan tanggung jawab yang harus diambil oleh Pemerintah saja. Akan tetapi, pihak UMKM yang menjadi pihak internal yang akan dikembangkan, dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah. Hal tersebut perlu dilakukan karena potensi yang dimiliki oleh internal UMKM mampu menciptakan kreatifitas usaha dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Pengembangan UMKM secara internal yaitu pengadaan permodalan, inovasi hasil produksi, perluasan pemasaran, legalitas usaha, dan pengadaan sarana dan prasara. Kemudian secara eksternal yaitu pemberian sumber permodalan, pengadaan pembinaan dan pelatihan, peningkatan promosi produk, perluasan pemasaran produk, dan penyediaan sarana dan prasarana.

Dengan kolaborasi yang baik dan dukungan yang berkelanjutan, sektor UMKM akan terus berperan sebagai motor penggerak ekonomi Indonesia. UMKM dapat menjadi sumber inovasi, lapangan kerja, dan pertumbuhan yang inklusif. Dalam era globalisasi dan transformasi digital, UMKM memiliki peluang besar untuk berkembang dan berkontribusi dalam menciptakan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan, dan merata di Indonesia. (smesta.kemenkopukm.go.id, 2023)

Saat ini, pertumbuhan UMKM di Indonesia sedang mengalami tren yang positif dengan jumlahnya terus bertambah setiap tahunnya. Tren positif ini akan berdampak baik bagi perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional sebesar 60,5%. Ini menunjukkan bahwa UMKM yang ada di Indonesia sangat potensial untuk dikembangkan hingga dapat berkontribusi lebih besar lagi bagi perekonomian. Pemerintah Republik Indonesia telah membantu para pelaku UMKM dengan memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau non perbankan. Berdasarkan data dari Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Penyaluran Usaha Mikro (Umi) sejak 2017 sampai dengan 2022 telah mencapai Rp26, 2 triliun kepada 7,4 juta debitur. (djpb.kemenkeu.go.id, 2023)

Sementara itu di Jawa Timur, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) K-UMKM memberi kontribusi 57,81% terhadap PDRB Jatim. Menjadikan potensi luar biasa yang harus diintervensi dengan program yang terukur agar pemulihan ekonomi bergerak bersama dengan Koperasi

termasuk juga UMKM. Dengan besarnya potensi dari UMKM di Jawa Timur, pemerintah mengambil langkah yang tepat agar pertumbuhan UMKM tidak terhenti di tengah jalan. Kolaborasi dengan berbagai pihak pun menjadi salah satu kunci penting untuk mendorong UMKM di Jatim untuk terus tumbuh dan berkembang. Pemerintah provinsi Jatim melakukan kolaborasi dengan Lazada Indonesia (Lazada), yang merupakan salah satu platform *e-Commerce* terdepan di tanah air. Kolaborasi ini turut menjadi bagian dari upaya Lazada dalam mendorong pertumbuhan ekosistem ekonomi di Jawa Timur dengan keberlanjutan Lazada bersama Pemprov Jatim menjalankan program Gerakan Akselerasi Karya Rakyat (AKAR) Digital Indonesia bertujuan untuk memberdayakan seluruh talenta di ekosistem Lazada, termasuk para penjual UMKM, pelanggan *e-Commerce*, serta pekerja logistik dan mitra kurir (*frontliner*). (Tribunnewes.com, 2023)

Negara Indonesia menggantungkan perekonomiannya salah satunya pada sektor pertambangan sebagai salah satu mata pencaharian dari kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sektor pertambangan menyerap begitu banyak tenaga kerja dan menambah cadangan devisa negara yang berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor pertambangan hingga saat ini mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional selain sektor industri dan pertanian. ( Berkas DPR RI, 2023)

Indonesia termasuk negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam berupa mineral dan batu bara yang menjanjikan. Selama ini sektor pertambangan memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan

negara. Hal ini ditunjukkan dari penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai lebih dari 70% untuk sektor non migas pada tahun 2022. Oleh karena itu Pemerintah membuat kebijakan hilirisasi industri dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan seperti meningkatkan nilai jual komoditas, memperkuat struktur industri, menyediakan banyak lapangan pekerjaan serta meningkatkan peluang usaha dalam negeri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan diperkuat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan memfokuskan agar tidak lagi melakukan ekspor bahan mentah. (esdm.go.id, 2022)

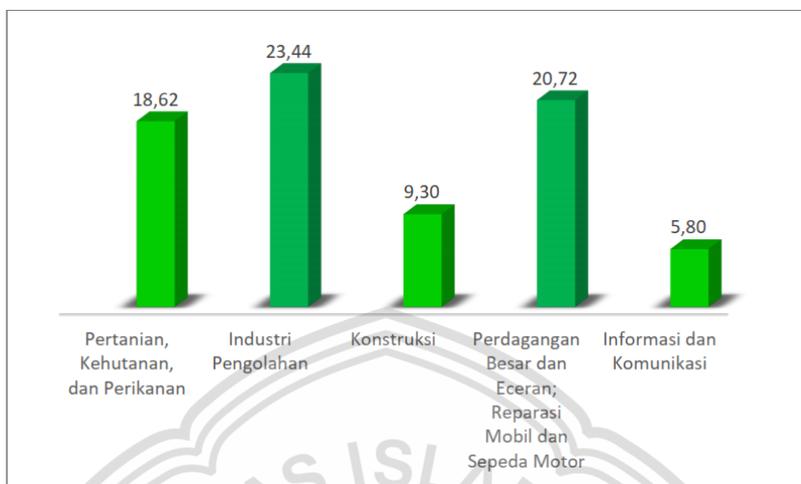
Salah satunya Kabupaten Tulungagung yang di dominasi dengan struktur bebatuan yang beraneka ragam membuat daerah ini kaya akan potensi bahan galian golongan C (batu gamping, marmer dan fosfat). Marmer adalah salah satu dari kekayaan alam Indonesia yang banyak diminati oleh masyarakat dalam dan luar negeri. Batu marmer ini merupakan salah satu hasil bumi unggulan yang terkenal di Desa Gamping, Kabupaten Tulungagung. Di Desa Gamping banyak terdapat perbukitan yang mengandung berbagai macam mineral diantaranya adalah batu marmer. Potensi galian yang ada di Desa Gamping ini berkembang menjadi industri marmer yang bermula sejak tahun 1970-an dan berpusat di Desa Gamping. Marmer adalah satu sumber daya alam yang sangat potensial untuk dapat dimanfaatkan dengan mendatangkan sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Warga desapun kemudian menekuni kerajinan marmer

secara lebih mendalam, sehingga muncul banyak industri rumahan yang bekerja dalam bidang kerajinan marmer. Kerajinan ini memberikan warna baru dalam dunia kerajinan tangan di Indonesia (Ilma Azizah, 2017).

Berdasarkan data daftar UMKM Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tulungagung pada observasi awal jumlah Potensi bahan galian tambang marmer Kabupaten Tulungagung tahun 2023 di Kecamatan Besuki 2.660.00m sedangkan di kecamatan Campurdarat 1.663.500m dengan kualitas marmer yang baik untuk bahan bangunan dan kerajinan. Kemudian jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Marmer Kabupaten Tulungagung adalah 31 industri dimana paling lama berdiri tahun 1992 dan terbaru tahun 2016 dengan mayoritas pemilik industrinya adalah laki-laki (Disperindag, 2023).

Kemudian, pertumbuhan UMKM industri kerajinan marmer dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan ini diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2023 diketahui bahwa industri pengolahan yang di dalamnya mencakup Industri kerajinan marmer terus menempati urutan paling banyak dalam menyumbang perekonomian dengan membuka lapangan usaha industri sebesar 23,44 persen seperti gambar dibawah.

**Gambar 1. 1**  
**PDRB menurut Lapangan Usaha**



*Sumber :BPS Kabupaten Tulungagung, 2023*

Industri Marmer di Kecamatan Campurdarat pada tahun 1970-an pada saat itu mengalami kejayaan terdapat sekitar 150 unit sehingga Kecamatan Campurdarat menjadi sentra kerajinan marmer. Namun, akibat krisis moneter pada Tahun 1997 menyebabkan beberapa industri di Indonesia mengalami kemunduran, salah satunya adalah industri kerajinan marmer yang terletak di Kecamatan Campurdarat. Sejak saat itu perkembangan industri marmer tidak melejit lagi, bahkan banyak industri yang memilih gulung tikar. Pada tahun 2004 industri kerajinan mengalami peningkatan kembali, bahkan semakin berkembang karena industri marmer Tulungagung merupakan salah satu industri kreatif berbasis kerajinan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu ciri khas daerah. Seiring dengan berjalannya waktu marmer Tulungagung semakin banyak diminati di pasaran domestik maupun internasional (Pangayoman, 2016).

Tetapi tidak berjalan dengan lama industri marmer mengalami kemunduran lagi seperti yang dikutip dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung yaitu pada tahun 2012-2014 hasil produksi kerajinan marmer mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Produksi kerajinan marmer semakin lama semakin mengalami penurunan pendapatan karena industri kecil tidak memahami mendalam mengenai dinamika persaingan produk yang ada. (Pangayoman, 2016).

Disisi lain, industri kerajinan marmer di Tulungagung mengalami banyak kesulitan seperti pengrajin marmer tidak terampil dalam teknologi, kurangnya pemahaman digital sehingga dikhawatirkan banyak akan mengalami penurunan pendapatan. Kondisi ini disebabkan karena perkembangan zaman, dimana banyak wilayah lain yang kini sudah menggunakan teknologi mulai dari mesin pemotong yang canggih hingga jual beli lewat e-commerce atau segala kegiatan jual beli ataupun transaksi yang dilakukan menggunakan sarana media elektronik (internet) membuat pekerjaan semakin efisien waktu, tenaga dan biaya. (faktualnews.co, 2022)

Kemudian, warga kecamatan Campurdarat Tulungagung juga mulai tertinggal dengan kemajuan terjadi dengan masih menggunakan tenaga manusia dalam pembuatan kerajinan marmernya dan hanya mengandalkan pemasaran tradisional dengan mengharap konsumen datang, dapat dipastikan omzet akan terjun bebas terbukti dengan banyak industri yang

kini harus menghentikan aktivitas pabrik karena sulitnya pemasaran secara offline (detiknews.com, 2020).

Dalam strategi pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM industri kerajinan marmer di era digitalisasi di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung dalam temuan peneliti secara langsung dilapangan ternyata memiliki kendala lain, identifikasi masalahnya yaitu :

1. Kesulitan dalam pengadaan permodalan, karena pemerintah hanya memberikan bantuan berupa kredit usaha. Bantuan ini tidak langsung diberikan kepada pelaku usaha melainkan melalui Bank Daerah yang bekerja sama dengan Kabupaten Tulungagung. Menurut adalah Ibu Ayu Lestari istri dari Bapak Reza Fauzi selaku pendiri Gemmy Mulya Onix yang merupakan anak perusahaan dari PT. Purnama Onyx mengatakan bahwa :

“Bantuan dari pemerintah memang ada, tetapi tidak langsung dari Dinas mbak hanya sebatas memberikan surat rekomendasi saja yang nantinya diserahkan kepada bank Daaerah Tulungagung. Surat rekomendasi tersebut seharusnya memudahkan, tetapi pada praktiknya kami tetap harus memenuhi semua persyaratan bank yang rumit. Jadi, surat itu kadang-kadang tidak lebih dari sekedar formalitas saja.”  
(Wawancara : 8 Mei 2024)

2. Dalam perluasan jaringan pemasaran terdapat kendala yang di alami oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) industri kerajinan marmer yaitu pada infrastruktur distribusi yang kurang mendukung. Pendistribusian atau pengiriman ke luar negeri sering mengalami kendala seperti yang dipaparkan oleh Bapak Rudi

Supriyadi selaku Pemilik UD. Adhi Jembatan Batoe yang khusus mengrajin marmer bathroom Desa Gamping, Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung sebagai berikut :

“ pemerintah tidak ikut campur mengenai proses pengiriman seperti ini mbak, untuk itu kami berusaha untuk meningkatkan kerjasama dengan pihak Kargo yang dapat membantu dalam pengiriman produk kerajinan marmer kami. Terkadang ketika pengiriman sudah sampai di pelabuhan Suarabaya ternyata berat produknya melebihi kapasitas, ya... saya kesana untuk mengecek barangnya langsung untuk mengambill sisa produk yang tidak lolos pengiriman.” (Wawancara : 13 Mei 2024)

3. Pengelolaan dan penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pelaku Usaha UMKM industri kerajinan marmer dan pemeberian alat bantu mesin berteknologi berupa mesin CNC yang kurang tepat. Sesuai dengan pemaparan yang dijelaskan oleh Bapak Harysnto selaku pekerja Pemotong batu Marmer Rumahan Desa Gamping, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung bahwa :

“ ketergantungan pada teknologi menjadi masalah baru bagi kami mbak, ketika sistem mengalami gangguan atau perangkat lunak tidak bisa digunakan, proses desain bisa berhenti. Ini membuat kendala pada proses produksi kami. Terkadang teknologi digital mengurangi sentuhan personal dan keunikan pengrajin di setiap produk, karena pada dasarnya tangan pengrajin memiliki nilai estetika tersendiri yang sulit dicapai dengan desain digital.itu sendiri mbak” (Wawancara : 15 Mei 2024)

4. Pada inovasi hasil produksi, Pelanggan atau konsumen lebih memilih produk kerajinan marmer yang sedang tren dipasaran seperti yang dijelaskan oleh Bapak Satriyo Ayom Santoso selaku Pemiliki PT.Barokah Alam pabrik marmer dengan sistem distribusi kemitraan

Di Desa Gamping, Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung sebagai berikut :

“corak yang menjadi ciri khas kami ini memberikan nilai tambah pada produk kami dan membuatnya lebih unik mbak, mbak tau sendiri kan kalau industri kerajinan marmer di Desa Gamping ini banyak, jadi biar konsumen bisa membedakan mana hasil produksi dari kami mana hasil produksi dari yang lain. Kendala kami di hasil produksi ini mbak, meskipun punya ciri khas tetapi terkadang tidak semua konsumen memahami atau menghargai seninya, malah meminta corak yang lagi nge-trend” (Wawancara : 13 Mei 2024)

Dari permasalahan diatas terhadap pelaku usaha UMKM industri kerajinan marmer di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat dengan kata lain adalah kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusianya. Dimana kondisi ini menyebabkan banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Padahal, sebagaimana diketahui apabila industri ini dikelola dan dikembangkan dengan baik maka akan mampu memberikan keuntungan bagi produsen dan tenaga kerja.

Oleh karena itu, agar memberikan kesejahteraan sosial bagi rakyat kecil, harus lebih diberdayakan lagi dengan strategi pemerintah dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan di era digitalisasi ini guna menunjang pembangunan daerah. Hal inilah menjadi tugas bagi dinas-dinas terkait untuk memberikan alternatif penyelesaiannya. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM, termasuk di industri kerajinan marmer, serta dukungan dalam pengembangan keterampilan dan teknologi adalah beberapa area atau jangkauan dimana pemerintah dapat berperan aktif.

Atas uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut lebih jauh, yang tertuang dalam Skripsi berjudul **“Strategi Pemerintah dalam Pertumbuhan dan Keberlanjutan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Industri Kerajinan Marmer di Era Digitalisasi.”**

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah, antara lain :

1. Bagaimana strategi Pemerintah dalam Pertumbuhan dan Keberlanjutan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Industri Kerajinan Marmer Di Era Digitalisasi di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana dampak digitalisasi dalam pertumbuhan dan keberlanjutan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Industri kerajinan marmer di Era Digitalisasi Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah ditentukan, maka tujuan penelitian ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis strategi Pemerintah dalam Pertumbuhan dan Keberlanjutan Usaha Mikro Kecil

dan Menengah (UMKM) Industri Kerajinan Marmer Di Era Digitalisasi di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung

2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis dampak digitalisasi dalam pertumbuhan dan keberlanjutan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kerajinan marmer Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Tercapainya tujuan penelitian yang telah disebutkan diatas, maka hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang telah diharapkan oleh penelitian antara lain :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang dapat dipergunakan dalam penelitian karya ilmiah di bidang Ilmu Administrasi
  - b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi mengenai dampak dari strategi pemerintah dalam pertumbuhan dan keberlanjutan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) industri kerajinan marmer di Era Digitalisasi Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung agar terealisasi dengan baik kedepannya
  - c. Untuk lebih memahami teori-teori yang telah dipelajari selama kuliah di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai dampak dari strategi pemerintah dalam pertumbuhan dan keberlanjutan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) industri kerajinan marmer di Era Digitalisasi Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung
- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa pemikiran maupun tindakan bagi Pengrajin industri Marmer di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terkait strategi pemerintah dalam pertumbuhan dan keberlanjutan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) industri kerajinan marmer di era digitalisasi di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung sudah berjalan cukup baik dengan melakukan sinergi meskipun terdapat beberapa kendala. Hal ini dapat dilihat dari kedua belah pihak antara pihak internal (pelaku usaha) meliputi pengadaan permodalan, inovasi hasil produksi, perluasan jaringan pemasaran, legitimasi usaha dan dari pihak eksternal (peran pemerintah) meliputi pemberian akses UMKM terhadap Sumber Permodalan, pengadaan pembinaan dan pelatihan, peningkatan promosi produk, perluasan pemasaran produk, serta sarana dan prasarana. Adapun dampak digitalisasi yang ditimbulkan dalam pertumbuhan dan keberlanjutan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) industri kerajinan marmer. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- A. Strategi Pemerintah dalam pertumbuhan dan Keberlanjutan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Industri Kerajinan Marmer di Era Digitalisasi terletak pada dua pihak yaitu pihak internal (Pelaku Usaha) dan Pihak Eksternal (Peran Pemerintah) dengan melakukan kolaborasi
  1. Pihak Internal (Pelaku Usaha)

a) Pengadaan Permodalan

Permodalan yang digunakan oleh UMKM industri kerajinan marmer umumnya menggunakan sumber modal pribadi atau reinvestasi keuntungan yang mengacu pada praktik menggunakan kembali sebagian dari laba usaha untuk mendukung keberlanjutan bisnis. Pelaku UMKM industri kerajinan marmer sulit dalam pengajuan kredit usaha karena kendala pada jaminan, serta solusi sementara bagi industri rumahan kerajinan marmer menggunakan pinjaman online.

b) Inovasi hasil Produksi

Inovasi hasil produksi yang dilakukan oleh UMKM industri kerajinan marmer yaitu memanfaatkan teknologi digital seperti perangkat lunak desain 3 Dimensi, dengan tujuan agar produk yang dihasilkan lebih presisi dan variatif. Produk yang dihasilkan dari UMKM ini menjadi lebih modern dan elegan sesuai dengan permintaan konsumen. Serta menambahkan sentuhan corak yang khas yang dimiliki oleh setiap pengrajin marmer pada Desa Gamping Kecamatan Campurdarat

c) Perluasan Jaringan Pemasaran

Dalam perluasan jaringan pemasaran menjadikan teknologi digital yaitu media sosial sebagai alat perluasan jaringan pemasaran dalam memasarkan produk UMKM industri kerajinan marmer Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung

dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan penjualan

d) Legalitas Usaha

Perizinan legalitas usaha diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2017 pasal 4 ayat (1) tentang penyelenggaraan perindustrian dan perdagangan wajib memiliki izin yang berikan kepada setiap usaha perindustrian dan perdagangan yang akan melakukan kegiatan usaha industri atau perdagangan.

2. Pihak Eksternal (Peran Pemerintah)

a) Pemberian Akses UMKM terhadap Sumber Permodalan

Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam pemberian permodalan untuk UMKM industri kerajinan marmer hanya memberikan bantuan permodalan melalui kredit usaha dimana dana yang diterima tidak langsung dari pemerintah pusat, melainkan dari lembaga keuangan yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tulungagung sesuai dengan peraturan Bupati Tulungagung Nomor 11 Tahun 2016 pasal 6 tentang pedoman pelaksanaan kredit modal kerja pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

b) Pengadaan Pembinaan dan Pelatihan

Pengadaan pembinaan dan pelatihan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Industri kerajinan marmer di Desa Gamping

Kecamatan Campurdarat yang dilakukan oleh Pemerintah bertujuan untuk mendapatkan para pengrajin yang berkompeten dan kompetitif serta mendapatkan produk unggulan yang dapat bersaing pada pasar nasional bahkan internasional yang akan berkontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Tulungagung

c) Peningkatan Promosi Produk

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung memberikan memberikan wadah bagi UMKM bagi industri kerajinan marmer dalam mempromosikan produknya agar bisa dikenal oleh kalangan masyarakat yang lebih luas melalui pameran atau bazar yang diikuti oleh seluruh Indonesia bahkan Internasional.

d) Perluasan Pemasaran Produk

Digitalisasi menjadi kunci dalam perluasan pemasaran produk yaitu berfokus pada cakupan pasar itu sendiri, dimana dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan beragam.

e) Sarana dan Prasarana

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung dalam memberikan bantuan atau fasilitas bagi pengrajin yaitu pada tahun 2022 berupa mesin CNC (*Computer Numerical Control*). Dimana mesin ini digunakan untuk memotong dan mengukir marmer dengan presisi tinggi sehingga meningkatkan kualitas dan kecepatan saat produksi, tetapi tidak semua pengrajin

mendapatkan fasilitas tersebut. Sedangkan pengrajin yang mendapatkan fasilitas dari pemerintah tidak digunakan dengan baik.

## B. Dampak digitalisasi dalam pertumbuhan dan keberlanjutan Usaha Mikro

### Kecil dan Menengah (UMKM) Industri Kerajinan Marmer

#### 1. Dampak Positif

Dampak positif dari digitalisasi yang ditimbulkan dalam pertumbuhan dan keberlanjutan Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) pada industri kerajinan marmer di Desa Gamping, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung meliputi peningkatan akses pasar melalui platform *e-commerce* dan media sosial, efisiensi operasional dengan menggunakan komputer untuk mengelola manajemen inventaris dan akuntansinya, peningkatan layanan pelanggan melalui media sosial instagram dan facebook, akses permodalan dengan mengajukan pinjaman online, serta inovasi produk yang lebih berkualitas dengan CAD (*Computer Aided Design*) yang kini dapat menghasilkan produk yang presisi tinggi, lebih cepat dan akurat.

#### 2. Dampak Negatif

Dampak digitalisasi bukan hanya dari sisi positif nya saja, tetapi ada juga beberapa tantangan yang dirasakan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tidak semua UMKM siap atau

mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi yang ada dapat diketahui beberapa dampak negatifnya meliputi : persaingan produk yang lebih ketat, investasi awal yang lebih besar, pelatihan karyawan dalam beradaptasi dengan teknologi baru seperti media sosial, beban finansial dan kebocoran data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab akibat mengambil pinjaman online, Adanya ketergantungan terhadap teknologi yang menghambat proses produksi, serta mengurangi sentuhan personal dan keunikan setiap produk pengrajin. Selain itu, biaya dalam pemeliharaan atau *maintenance* alat-alat penunjang yang canggih juga menjadi beban keuangan yang berat bagi UMKM dengan sumber daya yang terbatas.

## 5.2 Saran

- 1) Bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Perlu adanya Pendistribusian yang merata dalam pemberian alat penunjang sarana dan prasaran berupa mesin CNC (*Computer Numerical Control*) yaitu alat untuk memotong dan mengukir marmer dengan presisi tinggi dari pemerintah pada UMKM industri kerajinan marmer.
- 2) Bagi Pelaku Usaha mengenai permodalan, Perlu adanya pemisahan keuangan pribadi dan modal usaha serta perencanaan yang baik untuk masa depan dapat mengatasi resiko terkait kehilangan aset pribadi, modal yang terbatas dan stress finansial.

- 3) Bagi Pelaku Usaha, Perlu memperkuat kerjasama dengan pihak cargo yang dapat membantu dalam pengiriman produk kerajinan marmer. Karena langkah ini tidak hanya memastikan produk dapat sampai ke tangan konsume dengan lebih cepat dan efisien, tetapi juga akan mengatasi hambatan distribusi yang timbul seperti keterlambatan pengiriman, kerusakan barang selama transit, dan biaya logistik yang tinggi.
- 4) Bagi Pelaku Usaha, Perlu adanya pemanfaatan teknologi yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan baik dan terampil, karena tidak semua pelaku usaha UMKM industri kerajinan marmer mendapat bantuan fasilitas berupa mesin CNC. Meskipun demikian, pelaku usaha harus menyeimbangkan antara manfaat yang diperoleh dengan risiko yang ditimbulkan dari teknologi tersebut.
- 5) Bagi Pelaku Usaha, Perlu adanya perluasan pemasaran yang konsisten agar ciri khas dari produk UMKM industri kerajinan marmer Desa Gamping Kecamatan Campurdarat tetap terjaga serta menawarkan layanan desain kustom yang memungkinkan pelanggan memesan produk dengan desain atau ukuran khusus.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal :

- Achmad, Z. A., Azhari, T. Z., Esfandiar, W. N., Nuryaningrum, N., Syifana, A. F. D., & Cahyaningrum, I. (2020). Pemanfaatan media sosial dalam pemasaran produk UMKM di Kelurahan Sidokumpul, Kabupaten Gresik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(1), 17-31.
- Al Farisi, S., Iqbal Fasa, M., & Suharto. (2022). Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73–84. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9ino.1.307>
- Anggraeni, F. (2013). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha “Emping Jagung” Di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(6), 1286–1295.
- Arifudin, O., Wahrudin, U., Rusmana, F. D., & Tanjung, R. (2020). Strategi Inovasi Kemasan Dan Perluasan Pemasaran Abon Jantung Pisang Cisaat Makanan Khas Subang Jawa Barat. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 371-381.
- Dawud, J. (2004). Inkonsistensi Penerapan Model Pemerintahan Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan ....* <http://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/340>
- Dirgantara, U., & Suryadarma, M. (2014). Verifikasi Dalam Era Digitalisasi Dengan Menggunakan Metode Chatbot. *Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma*, 10(1). <https://doi.org/10.35968/jsi.v10i1.998>
- Djaenuri, A. (2015). Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah. *Repository.Ut.Ac.Id*, 3, 1–46. <http://repository.ut.ac.id/4206/1/IPEM4214->

M1.pdf

Fatimah, C. (2023). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Lamongan (Studi Kasus di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan).

Ferdiansyah, A., & Bukhari, E. (2021). Pengaruh Modal, Financial Knowledge, Teknologi Dan Media Sosial Terhadap Kinerja UMKM Fashion Di Bekasi Utara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*, 17(2), 103-114.

Firmansyah, R. (2014). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Madiun (Studi Pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan Dan Pariwisata Dan Sentra Industri Brem Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 2(1), 154–160.

Gainau, P. C., & Kilay, T. N. (2023). PENGARUH LAYANAN PERMODALAN DIGITAL TERHADAP KINERJA UMKM. *Jurnal Cita Ekonomika*, 17(2), 208-215.

Ilma Azizah, J. (2017). Perkembangan Industri Marmer D Desa Besole Kabupaten Tulungagung Tahun 1990-1998. *Avatara*, 5(3), 501–514.

Indika, M., & Marliza, Y. (2019). Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas. *Journal Management, Business, and Accounting*, 18(3), 49-66.

Kurnianingrum, T. P. (n.d.). *Bagian I ( Studi Kasus Pt . Newmont Nusa Tenggara*. 1–160.

Manggu, B., & Beni, S. (2021). Analisis Penerapan Segmentasi, Targeting, Positioning (STP) dan Promosi Pemasaran Sebagai Solusi Meningkatkan Perkembangan UMKM Kota Bengkulu. *Sebatik*, 25(1), 27-34

Pubiyanti, I., Putra, A. D., Setiawan, B., Hibatulloh, M. H., Ambar Saputri, N. A.,

- & Sepsiana, W. S. (2021). Pelatihan Digitalisasi Umkm Dan Pembuatan Akun E-Commerce. *Buguh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 6–16. <https://doi.org/10.23960/buguh.v1n2.107>
- Purwana, D., Rahmi, R., & Aditya, S. (2017). Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kelurahan Malaka Sari, Duren Sawit. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (JPMM)*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.21009/jpmm.001.1.01>
- Putra, L. R., Mindarti, L. I., & Hidayati, F. (2018). Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Ekonomi Kreatif Kerajinan Kulit Di Kabupaten Magetan. *Sumber*, 5(71.183), 969-979.
- Setiawan Hari Purnomo, Z. (2007). *Manajemen Strategi*.
- Wanto, A. H. (2018). Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(1), 39. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n1.p39-43>
- Widiastuti, E. (2019). Peningkatan Pengetahuan, Ketrampilan dan Kemampuan Sumber Daya Manusia sebagai Strategi Keberlangsungan Usaha pada UMKM Batik di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 21(1). <https://doi.org/10.32424/jeba.v21i1.1286>
- Wijaya, R. A., Qurratu'aini, N. I., & Paramastri, B. (2019). Pentingnya Pengelolaan Inovasi Dalam Era Persaingan. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 5(2), 217-227.
- Wulandari, T. I. (2014). Studi Keberlangsungan Industri Kecil Sepatu di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. *Swara Bhumi*, 3(3), Article 3. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/swara-bhumi/article/view/8516>
- Zahro, N. A., Firmansah, M., Pakarti, A. F. A., Agustina, T., Risnumawan, A., & Darmawan, A. (2024). Penerapan Teknologi Digital 3D untuk Optimalisasi

Pemasaran Fashion Lokal pada UMKM Sarikat Jaya Kekean. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(1), 105-113.

**Buku :**

Abdurohim, D. (2021). Pengembangan UMKM (Kebijakan, Strategi, Digital Marketing dan Model Bisnis UMKM). Bandung : Refika Aditama.

Afifudin, S. A., & Si, M. (2012). Pengantar Administrasi Pembangunan: Konsep, Teori, dan Implikasinya di Era Reformasi. Bandung: CV Alfabeta.

Ali, M. (2011). *Modul Kuliah Manajemen Industri*

Anggara, S., & Sumantri, L. (2016). *ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Teori dan Praktik*. Pustaka Setia, 1689–1699.

Digital, E. (2019). *LANDASAN TEORIA . Deskripsi Pustaka*. 8(2), 9–24.

Etzkowitz, H. And L, Leydesdorff, 1995. The Triple Helix-University-Industry-Government Relation : A laboratory for knowledge based economic development. *EASST Rev.*, 14: 14-19.

Lexy J Moleong. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya

Moleong, L.J. 2011 . Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Sanjaya, P. K. A., & Nuratama, I. P. (2021). Tata Kelola Manajemen & Keuangan Usaha Mikro Kecil Mengengah.

Setiawan Hari Purnomo, Z. (2007). *Manajemen Strategi*.

Wheelen, Thomas dan Hunger, David. 2003. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: ANDI Publisher.

Wijoyo, H., Vensuri, H., Widiyanti, Denok, S., Haudi, Prasada, D., Kristianti, Lily, S., Luffti, A. M., Rizka, I., Akbar, & Musnaini. (2020). *Buku Digitalisasi UMKM*.

Yusuf, Iyas. (2014) Peran dan Fungsi Pemerintah dalam proses pemberdayaan masyarakat, hal. 05.

**Skripsi :**

Ilma Azizah, J. (2017). Perkembangan Industri Marmer D Desa Besole Kabupaten Tulungagung Tahun 1990-1998. *Avatara*, 5(3), 501–514.

Kurnianingrum, T. P. (n.d.). *Bagian I ( Studi Kasus Pt . Newmont Nusa Tenggara*. 1–160.

Pangayoman, K. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Industri Kerajinan Marmer Di Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. *PENGARUH PENGGUNAAN PASTA LABU KUNING (Cucurbita Moschata) UNTUK SUBSTITUSI TEPUNG TERIGU DENGAN PENAMBAHAN TEPUNG ANGKAK DALAM PEMBUATAN MIE KERING*, 15(1), 165–175.

Haninda, Yola (2022). Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Industri Pengolahan Kopi di Kota Banda Aceh

**Website :**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2021

Detik news, 2023

Djpb.kemenkeu.go.id, 2023

Esdm.go.id, 2023

Kemenkopukm.go.id, 2023

Media Indonesia, 2023

Tribun News,2023

**Peraturan Undang-Undang :**

Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Modal Kerja pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan

